

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**

RENCANA KERJA TAHUN 2025

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



**#bangga
melayani
bangsa**

DUKCAPIL
**GO
DIGITAL**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1446

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta terselesaikannya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2025 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui perangkat daerah, maupun masukan dan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Oleh karena itu perbaikan demi perbaikan akan terus kita lakukan. Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025.

Batam, 12 Juli 2024



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**

HERYANTO, SE

NIP. 19641107 199203 1 015

SIGN HERE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	21
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam	38
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam	43
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui perangkat daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2025 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah kota Batam tahun 2005 yaitu **“Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”** serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan database kependudukan nasional”**, melalui strategi:

1. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini dijadikan acuan untuk bahan penyusunan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahunan yang merupakan sebuah proses

penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program kegiatan Perangkat Daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, Renja PD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Renja PD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Walikota melalui mekanisme musrenbang;
2. Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan indikator dan target capaian pada setiap tahunnya;
3. Renja PD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah;

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 s.d 2026. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan. Penyusunan dokumen Renja PD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Renja PD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar di bidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 23. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Walikota Batam tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Nomor 84 Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1423).

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

➤ **Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun anggaran 2023 berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 per Desember 2023 terdapat 2 Program yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan. Program Pendaftaran Penduduk dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi sebesar 48,39% dari target 48%.

Selanjutnya untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 kegiatan telah memenuhi target kinerja sebesar 100%. Adapun 5 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Namun hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 per Desember 2023 juga menunjukkan adanya hasil capaian kinerja program yang tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja sebesar 98,5% hanya terealisasi 96,95%.

Tidak adanya lagi dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK-NF Yanminduk) dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2022 juga menggerus kemampuan

APBD dalam membiayai belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Padahal masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain:

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, khususnya gedung kantor yang sempit dan tidak representatif lagi dalam menampung tingginya mobilitas masyarakat Kota Batam dalam melakukan pengurusan Adminduk setiap hari sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal;
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap metode pengurusan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menitipkan pengurusan dokumen administrasi kependudukannya melalui orang lain atau bahkan calo;
3. Tingginya produksi arsip aktif setiap hari dan belum tersedianya ruangan arsip yang memadai menyebabkan pengelolaan arsip belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - a. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal:
 - b. Kompetensi dibidang pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Teknis penyusunan perencanaan dan strategi dalam menghadirkan pelayanan prima.
5. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
6. Sistem SIAK Terpusat yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri saat ini yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan tentu masih terdapat kendala dalam penerapannya dan secara terus menerus masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 4 Program 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Perubahan T.A. 2023 adalah :

1. BELANJA OPERASI	
1) Belanja Pegawai	: Rp. 11.861.007.030,-
2) Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 3.506.649.460,-
2. BELANJA MODAL	
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 943.567.200,-
TOTAL ANGGARAN	: Rp. 16.311.223.690,-

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat 3 Sub Kegiatan yang mengalami rasionalisasi atau pengurangan anggaran yang cukup signifikan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang berisi belanja perjalanan dinas pengambilan blanko KTP-El ke Ditjen Dukcapil di Jakarta, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Hal di atas tentu berimplikasi terhadap kinerja Perangkat Daerah mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan Perangkat Daerah yang langsung bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional hendaklah dilakukan oleh stakeholder terkait di masa yang akan datang dengan memperhatikan isu-isu dan kebutuhan sektoral masing-masing perangkat daerah yang tentu saja berbeda.

Adapun rincian hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2023 yang dikaitkan terhadap prakiraan tingkat realisasi capaian target Renstra s.d. Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
2	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1	1	2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	1	2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/ Bulan	76 orang/ Bulan	78 orang/ Bulan	78 orang/ Bulan	100 %	79 orang/ Bulan	79 orang/ Bulan
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen
2	1	1	2.0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	-	-	-	-	100%	100 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	-	-	-	-	12 Orang	12 Orang
2	1	1	2.0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2	1 1 2.0 2 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	118 Unit	-	118 Unit	118 Unit	100 %	-	118 Unit	100 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	73 Unit	73 Unit	73 Unit	100 %	177 Unit	73 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	1	2.0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
				Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	13 Laporan	100 %
2	1	1	2.0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	5 Unit	100 %
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100 %	129 Unit	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
2	1	2			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	97,48 %	87%	100 %	114,94 %	100 %	100 %	100 %
2	1	2	2.	0	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
					Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	160.000 Dokumen	120.000 Dokumen	120.000 Dokumen	156.976 Dokumen	100 %	135.000 Dokumen	135.000 Dokumen	100 %
2	1	2	2.	0	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani dokumen kependudukan sesuai ketentuan	100 %	100%	-	-	-	-	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2.	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
2	1	3			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	100 %	95,54%	98,50 %	96,95 %	98,42 %	99,00 %	100 %
2	1	3	2.	0	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	42.000 Dokumen	36.000 Dokumen	36.000 Dokumen	36.428 Dokumen	100 %	38.000 Dokumen	42.000 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	3	20	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1	2	2										
				Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	1	4		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	35,48 %	48 %	48,39%	100,81%	100%	100%	100%
2	1	4	2.0	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100 %	35,48 %	48 %	48,38% %	100,81 %	100 %	100 %	100 %
			1										
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %
2	1	4	2.0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3										
				Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Capaian realisasi sampai dengan Desember 2023:

Sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017, untuk subbab 2.1 mencantumkan pokok materi berupa:

- Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
 - Program Pencatatan Sipil: 96,58% target 98,5%.
- Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota: 100%.
- Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
 - Program Pendaftaran Penduduk : 100% target 87%.
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: 48.39% dari target 48%.

Dari tabel di atas berdasarkan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak terealisasi pada APBD T.A. 2023 yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Disamping itu berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) T.A. 2023 terdapat 3 Sub Kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran yang cukup signifikan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang berisi belanja perjalanan dinas pengambilan blanko KTP-El ke Ditjen Dukcapil di Jakarta, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pencapaian target Renstra tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guna penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK Outcome Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup 4 (empat) hal pokok yaitu Persentase Perekaman KTP Elektronik, Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Adapun gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Indikator	SPM /standa r nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,31%	89%	90%	91%	91,80%	91,09%	91%	92%	
	1) Survei Kepuasan Masyarakat		√	88,31	89	90	91	91,80	91,09	91	92	
B.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2) Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
A.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			89%	93%	97%	99%	97,24%	98%	99%	99%	
	3) Persentase Perekaman KTP Elektronik		√	80%	87%	94%	98%	97,48%	100%	99%	99%	
	4) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak		√	42%	50%	60%	70%	50,39%	54,10%	70%	80%	

	5) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (anak usia 0-17 tahun)		√	98%	98,5%	99%	99,5%	95,54%	96,95%	99%	99,5%	
B.	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan			34%	48%	100%	100%	32,56%		50%	100%	
	6) Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		√	34%	48%	100%	100%	35,48%	48,39%	100%	100%	

Berdasarkan table 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan rasio perhitungan sebagai berikut :

- Survei Kepuasan Masyarakat dihitung persepsi pengguna layanan terhadap Disdukcapil dinilai dari 9 unsur pelayanan yang terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana yang dilakukan dua kali setiap semester dalam satu tahun. Berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang mendapatkan nilai 91,09 dengan mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan tercapai dari target renstra sebesar 89%
- Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah dihitung dari Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dihitung dari survei pegawai terhadap setiap urusan baik di bagian umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Disdukcapil. Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan Desember 2023, persentase terpenuhi penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% tercapai dari target renstra di tahun 2023.
- Persentase Perekaman KTP-Elektronik dihitung dari Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El dibagi jumlah penduduk Wajib KTP dikali 100% sebagaimana rumus di bawah ini:

$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$

Berdasarkan data agregat semester 2 tahun 2023 Perekaman KTP-Elektronik mencapai 100 % dari target Renstra sebesar 87 %.

- Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dihitung dari jumlah anak yang telah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dikali 100 % dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah anak yang telah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari}} \times 100\%$
--

Target Nasional penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 adalah sebesar 50 %. Saat ini capaian penerbitan Kartu Identitas Anak Kota Batam sudah mencapai 54,10 %, artinya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak Kota Batam sudah berhasil melampaui target Nasional.

- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dihitung dari jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (anak usia 0-18 tahun) dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100 %, sebagaimana rumus digambarkan pada rumus perhitungan di bawah ini:

$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (anak usia 0-18 tahun)}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$

Sampai dengan semester 2 tahun 2023 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sudah mencapai 96,95 % dari target Renstra sebesar 98,5 %.

- Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dihitung dari jumlah PD yang telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah PD yang melakukan perjanjian kerja sama dikali 100 %, sebagaimana rumus di bawah ini:

$\frac{\text{Jumlah PD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan}}{\text{Jumlah PD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (selain Kecamatan)}} \times 100\%$

Untuk tahun 2023 Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan dan melakukan perjanjian kerja sama yaitu sebesar 48,39% dari target Renstra pada tahun 2023 yaitu 48%.

Namun perlu menjadi catatan bahwa target indikator Renstra pada tahun 2024 dan 2025 yaitu sebesar 100%. Karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, saat ini terdapat kendala dalam mencapai target indikator OPD yang telah memanfaatkan data

kependudukan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan surat edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat *ISO 27001:2013* bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Disamping itu ketersediaan *internet private*/jaringan tertutup di Pemerintah Kota Batam masih terbatas di area Batam Center saja yang menyebabkan OPD yang ada di wilayah Sekupang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan data kependudukan. Hal di atas tentu menjadi kendala dalam pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun yang akan datang.

Selain 4 (empat) IKK *Outcome* Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah. Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar Pelayanan (SP) untuk pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan dengan rata-rata membutuhkan waktu 1 hari kerja. Dengan ketentuan persyaratan lengkap. Sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai alur dan proses yang telah diatur dalam aturan Perundang-Undangan ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2023 dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja

(*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Ketersediaan Blanko KTP-El yang masih fluktuatif.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Seyogyanya KTP dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Artinya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan cakupan kepemilikan KTP-el tidak dapat mencapai 100 % antara lain:

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-El Kota Batam dalam 1 tahun;
- b. Kondisi Peralatan cetak KTP-el yang belum memadai sampai ke tingkat kecamatan.

2. Rendahnya Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil terutama akta perkawinan dan akta kematian. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. Masih adanya masyarakat yang belum sadar adminduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri sebagai TKI dalam jangka panjang;
- b. Minimnya pengembangan kualitas SDM terhadap kompetensi di bidang pelayanan;

3. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

4. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Android yang dapat dengan mudah di akses melalui *Smartphone*.

Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-El. Kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-El yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang diperkirakan akan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan dilakukan melalui tahapan strategi. Rumusan akar masalah yang dituangkan dalam *pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029*, Hasil analisis dimaksud dirumuskan kelemahan/permasalahan internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan

- 1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;

- 3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- 5) Adanya komitmen kepala dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batam.
 - Implementasi Standar Manajemen Mutu
 - Adanya motivasi belajar aparatur pelaksana yang tinggi
- 6) Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah beroperasi di 9 kecamatan ditambah 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Faktor Kelemahan/ Permasalahan

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan
 - Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
 - Kurangnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK
- 2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan, kegiatan dan fungsi, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan dan target kinerja.
- 4) Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan :
 - Tingginya migrasi masuk yang menyebabkan kendala pendataan administrasi penduduk non permanen (perbedaan data SIAK dengan data BPS)
- 5) Belum optimalnya penerbitan KTP, KK, dan Akta Kematian:
 - Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan blanko KTP Elektronik yang masih tersentralisasi
 - Keterbatasan SDM di daerah hinterland untuk layanan jemput bola
 - Masih rendahnya pelaporan akta kematian

c. Faktor Peluang

- 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016.

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil.

d. Faktor Tantangan

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah.
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pada pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Adanya stigma dan pola pikir masyarakat bahwa alur pengurusan Administrasi dan Dokumen Kependudukan itu sulit, mahal, dan berbelit-belit.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis ini yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Dalam satu periode Renstra Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi perancangan awal Perangkat Daerah yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2021- 2026 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.887.165.663	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.405.778.268	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.037.859.856	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	16.016.358.188	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12.970.679.856	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	16.016.358.188	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	67.180.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	561.891.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	249.356.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	240.385.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Orang	321.506.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Orang	249.356.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	3.438.040.129	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	334.358.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.033.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.187.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.826.677.129	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	62.163.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48.876.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.652.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.588.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.658.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	496.866.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	235.698.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)									(10)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	761.705.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	-	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	32 Unit	106.960.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	1.750.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	654.745.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.639.484.682	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	761.176.080	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	469.920.282	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	474.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.094.564.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	226.026.080	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	459.889.996	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	100%	1.282.825.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	184.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	191.419.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	101.079.996	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	71.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	976.816.000	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98%	589.857.048	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98%	1.828.830.000	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100%	509.421.996	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100%	1.802.661.000	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	116.616.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	79.193.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	392.805.996	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	1.723.468.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	80.435.052	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.169.000	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	80.435.052	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	26.169.000	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	99,50%	455.798.628	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	99,50%	279.508.000	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100%	375.363.576	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100%	194.558.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	40.000 Dokumen	375.363.576	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	40.000 Dokumen	194.558.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	80.435.052	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	84.950.000	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	80.435.052	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	84.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100%	234.188.210	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100%	44.542.804	
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100%	171.594.777	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	100%	25.530.000	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	171.594.777	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	25.530.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	62.593.433	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	19.012.804	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	62.593.433	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	19.012.804	
	Grand Total			22.167.009.549	Grand Total			21.558.659.072	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian waktu, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan yang secara fisik diusulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima. Pada masa yang akan datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan mendapatkan **Sertifikasi Manajemen Mutu Pelayanan Publik ISO 9001:2015**.

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8/9427/Dukcapil tentang Fasilitasi Dashboard Profil Kependudukan (terlampir), dengan ini kami menyampaikan salah satu poin sebagai berikut :

- 1. Kewajiban Penyusunan Buku Profil Kependudukan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota/Provinsi berkewajiban menyusun Buku Profil Kependudukan setiap tahunnya. Mohon agar kegiatan penyusunan Buku Profil Kependudukan dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran tahunan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator	Satuan
1	Pengelolaan Profil Kependudukan / Penyusunan Profil Kependudukan / Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sekupang	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang.

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam urusan kependudukan yang tertuang di dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2045 adalah mengangkat isu kependudukan adalah salah satu modal dasar bangsa selain kekayaan alam.

Indonesia akan mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan struktur penduduk yang menguntungkan, di mana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitasnya.

Perubahan struktur penduduk menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia. Jumlah penduduk Indonesia dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk berkualitas diperkirakan sebanyak 70 juta, yang tersebar baik di perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk di

Indonesia dengan pertumbuhan yang seimbang, *consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat *consuming class* ini mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi, tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Dirjen Dukcapil kemendagri melakukan beberapa terobosan diantaranya:

1. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

2. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Android yang dapat dengan mudah di akses melalui Smartphone. Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-El. Kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-El yang terbatas.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan tujuan organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat
2. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, disepakati sebanyak 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rincian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Bidang Adm. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				21.558.659.072				23.008.571.265
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	19.405.778.268			100%	21.679.709.359
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	16.016.358.188			100%	13.529.775.140
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	105 Orang/bulan	16.016.358.188	PAD, Dana Transfer		76 Orang/bulan	13.462.595.140
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	-	0			24 Dokumen	67.180.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	249.356.000			100%	561.891.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	0 Paket	0	PAD		4 Paket	240.385.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	20 Orang	249.356.000	PAD		24 Orang	321.506.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	334.358.000			100%	3.591.237.491
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	14.187.000	PAD		1 Paket	29.033.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	62.163.000	PAD		7 Paket	2.979.874.491
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11.652.000	PAD		3 Paket	48.876.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	10.658.000	PAD		3 Paket	36.588.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	235.698.000	PAD		38 Laporan	496.866.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	761.705.000			100%	1.817.025.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kota Batam	32 Unit	106.960.000	PAD		-	0
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	74 Unit	654.745.000	PAD		155 Unit	1.817.025.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	761.176.080			100%	1.702.276.945
	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	1 Laporan	60.750.0000	PAD		1 Laporan	75.000.000
	Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	474.400.000	PAD		5 Laporan	469.920.282

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Laporan	226.026.080	PAD		13 Laporan	1.157.356.663
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	1.282.825.000			100%	477.503.783
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	43.540.000	PAD		1 Unit	41.780.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	5 Unit	191.419.000	PAD		5 Unit	184.750.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	105 Unit	71.050.000	PAD		105 Unit	101.079.996
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	976.816.000	PAD		1 Unit	149.893.787
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		98%	1.828.830.00			100%	612.448.573
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan		100%	1.802.661.000			100%	528.932.858
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam	12 Dokumen	79.193.000	PAD		12 Dokumen	116.616.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	150.0000 Dokumen	1.723.468.000	PAD		160.0000 Dokumen	412.316.858
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	26.169.000			100%	83.515.715
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	1 Laporan	26.169.000	PAD		1 Laporan	83.515.715
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Kota Batam	99,50%	279.508.000			100%	473.255.715
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Kota Batam	100%	194.558.000			100%	389.740.001
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam	40.000 Dokumen	194.558.000	PAD		42.000 Dokumen	389.740.001
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Batam	100%	84.950.000			100%	83.515.714
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Batam	1 Laporan	84.950.000	PAD		1 Laporan	83.515.714

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	44.542.804			100%	243.157.618
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	Kota Batam	100%	25.530.000			100%	178.166.858
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam	11 Dokumen	25.530.000	PAD		11 Dokumen	178.166.858
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam	100%	19.012.804			100%	64.990.760
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam	1 Laporan	19.012.804	PAD		1 Laporan	64.990.760

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan Dinas setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026, pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Terdapat berbagai macam sumber pendanaan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa Sumber pendanaan daerah diantaranya adalah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dll. Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										21.558.659.072	
2	1 2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										19.405.778.268	
2	1 2	1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										16.016.358.188	
2	1 2	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	105 Orang/bulan	100 %	16.016.358.188	PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	1 2	1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										249.356.000	
2	1 2	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	0 Paket	100 %	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	1 2	1	2. 05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	20 Orang	100 %	249.356.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	1	1	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah								334.358.000			
2	1	1	2.	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	14.187.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	4 Paket	100 %	62.163.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Paket	100 %	11.652.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	10.658.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	06	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	235.698.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	1	1	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								761.705.000			
2	1	1	2.	07	6	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	32 Unit	100 %	106.960.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	74 Unit	100 %	654.745.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								761.176.080			
2	1	1	2.	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 Laporan	100 %	60.750.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	4 Laporan	100 %	474.400.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2	1	1	2.	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	5 Laporan	100 %	226.026.080	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	1	1	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.282.825.000		
2	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	43.540.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		
2	1	1	2.	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5 Unit	100 %	191.419.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		
2	1	1	2.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	105 Unit	100 %	71.050.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	1	2.	09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	976.816.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)
2	1	2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1.828.830.000		
2	1	2	2.	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							1.802.661.000		
2	1	2	2.	01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan		98 %	12 Dokume n	100 %	79.193.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)
						ATK, Kertas dan Cover, Cetak Formulir Penunjang Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
2	1	2	2.	01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan		98 %	150.000 Do kumen	100 %	1.723.468.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)
						Ribbon/Tinta Printer Cetak KTP-El dan Pengadaan Blanko KIA (Kartu Identitas Anak)									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2	1	2	2.	03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										26.169.000		
2	1	2	2.	03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		98 %	1 Laporan	100 %	26.169.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		
					Cetak Spanduk/Banner, Konsumsi Rapat												
2	1	2	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL										455.798.628		
2	1	2	2.	01	Pelayanan Pencatatan Sipil										194.558.000		
2	1	2	2.	01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan		99,5 %	40.000 Dok umen	100 %	194.558.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		
					ATK, Kertas dan Cover, Tinta Printer dan Cetak Formulir Penunjang Pelayanan Pencatatan Sipil												
2	1	2	2.	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										84.950.000		
2	1	2	2.	02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		99,5 %	1 Laporan	100 %	84.950.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		
					Cetak Spanduk/Banner, Konsumsi Rapat												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									44.542.804			
2	1	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									25.530.000			
2	1	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama		100 %	11 Dokumen	100 %	25.530.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			
					ATK, Tinta Printer, Penggandaan dan Penjilidan, Konsumsi Rapat												
2	1	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									19.012.804			
2	1	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 %	1 Laporan	100 %	19.012.804	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			
					Cetak Spanduk/Banner, Konsumsi Rapat												
TOTAL													21.558.659.072				

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2021 – 2026. Pada dasarnya Renja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 mencakup 24 Sub Kegiatan, 12 Kegiatan dalam 4 Program untuk mencapai 1 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Renja tahun 2025 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Melalui Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

➤ Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2025 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/*stakeholders* yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;

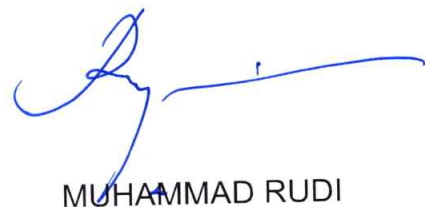
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025;

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026. Pada akhir tahun anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI